

FAKTOR DETERMINAN PENYEBAB KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN

THE DETERMINANT FACTORS OF POVERTY CAUSES IN SOUTH SULAWESI

Kissumi Diyanayati dan Etty Padmiati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Sonosewu, Yogyakarta, Indonesia

Hp. 081328308909 dan 08157904193

Email: *diyanasongko@gmail.com*

Naskah diterima 7 Juni 2017, direvisi 13 Juli 2017, disetujui 3 Agustus 2017

Abstract

The research aimed to reveal the dominant factors that cause poverty. The research used quantitative and qualitative techniques. The determination of research location used purposive technique, chosen from one of 34 provinces used as research location of Concept and Indicator of Poverty. The research population was the entire poor families, registered and unregistered. The samples were determined randomly, totaling 1,200 people from two regions (Makassar City and Maros Regency). Each area of 600 people with 540 details comes from poor registered family heads and 60 non-registered poor families. Data collected through questionnaires, interview guides, observation guide, documentary analysis, and other relevant parties. Quantitative data and information were computed using Excel and SPSS version 17.00 for Windows, poverty construct test using confirmatory analysis factor with the help of Lisrel 8.4 program, the result was described. The research found that the cultural dimension has positive and significant contribution in forming poverty in South Sulawesi, especially in the City of Makassar and Maros Regency. The founding was relevant to the condition of Indonesian society in general, which still prioritizes socio-cultural values in everyday life. These values, such as the strength of the spirit of mutual cooperation, kinship relationships, the habit of conducting deliberations in deciding the problem, were still firmly rooted in the life of society. Knowing the determinants of the causes of poverty in South Sulawesi (Makassar City and Maros Regency), the intervention needed in poverty alleviation should be more emphasized on the awareness of the society about the habits that have become cultural and burdensome society, especially the poor. It needed also an elucidation and social counseling not living frugally, not making it up, and helping them as what might be able to be done by not leaving current poverty alleviation programs. In addition, it is also strived to foster community empowerment for the creation of community independence, as the community will gain understanding and be able to control the social, economic, and political power in order to improve their social welfare.

Keywords: *Determinant Factors, Poverty Causes.*

Abstrak

Penelitian tentang Faktor Determinan Penyebab Kemiskinan di Sulawesi Selatan bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian menggunakan teknik *purposive*, yaitu memilih salah satu provinsi dari 34 provinsi yang digunakan sebagai lokasi penelitian, Konsep dan Indikator Kemiskinan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh keluarga fakir miskin yang teregister dan yang tidak teregister. Sampel akan ditentukan secara random berjumlah 1.200 orang berasal dari dua wilayah (Kota Makassar dan Kabupaten Maros), tiap wilayah 600 orang dengan rincian

540 orang berasal dari kepala keluarga miskin teregister dan 60 orang kepala keluarga miskin non-register atau yang belum mendapat program. Teknik pengumpulan data digunakan kuesioner, panduan wawancara, panduan pengamatan, dan telaah dokumen yang relevan. Data dan informasi yang dijangkau secara kuantitatif diolah secara komputasi dengan menggunakan program excel dan statistik SPSS versi 17.00 for Windows, serta pengujian konstruk kemiskinan menggunakan *confirmatory faktor analysis* dengan bantuan program LISREL 8.4, hasilnya dideskripsikan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dimensi budaya memiliki kontribusi yang positif dan signifikan dalam membentuk kemiskinan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Hasil tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, yang masih mengedepankan nilai sosial budaya dalam kehidupansehari-hari. Nilai tersebut, seperti kuatnya semangat gotong royong, hubungan kekerabatan, kebiasaan melakukan musyawarah dalam memutuskan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan diketahuinya faktor determinan penyebab kemiskinan di Sulawesi Selatan, intervensi yang dibutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan lebih dititikberatkan pada penyadaran masyarakat tentang berbagai kebiasaan yang sudah menjadi budaya dan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Penyuluhan dan bimbingan sosial tentang hidup hemat, tidak mengada-ada, dan menolong semampunya perlu lebih sering dilakukan dengan tidak meninggalkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan. Perlu diupayakan pula penumbuhan keberdayaan masyarakat untuk terciptanya kemandirian masyarakat, karena masyarakat akan memperoleh pemahaman dan mampu mengontrol daya sosial, ekonomi, dan politik agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Kata kunci: Faktor Determinan, Penyebab Kemiskinan.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, dengan kata lain kemiskinan merupakan realitas sosial yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan manusia tetapi kenyataannya sulit untuk dihindarkan, bahkan hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi” dalam kehidupan. Kondisi ini tidak hanya dialami negara yang sedang berkembang, tetapi juga dialami negara maju yang ternyata juga masih memiliki kantong-kantong kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan Gunawan Sumodiningrat (1999) bahwa, kemiskinan tetap ada di negara-negara paling maju, kendati dalam skala yang lebih kecil. Namun sekecil apapun jumlah golongan miskin, tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap enteng untuk dipecahkan, karena menyangkut dimensi kemanusiaan. Betapa menggelisahkan, pada era yang sudah semakin canggih ini ternyata kemiskinan masih saja tetap dominan. Kemajuan jaman yang diekspresikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan modernitas, di satu sisi hanyalah memberikan kontribusi kesejahteraan pada sebagian kecil penduduk dunia. Kejayaan sebagian kecil manusia di belahan bumi ini seringkali menelan dan mengorbankan sebagian besar manusia

lainnya ke lembah kemiskinan (Ambar Teguh Sulistiyan, 2004).

Apa itu kemiskinan? Berbagai pendapat tentang kemiskinan telah berkembang dari waktu ke waktu. Merumuskan suatu definisi tentang kemiskinan dari sejumlah pandangan dan pendekatan yang dinamis memang tidak mudah, karena formulasi dari para ahli dan peneliti dipengaruhi oleh kajian masing-masing (Muhadjir Darwin, 2005). Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan suatu individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Gunawan Sumodiningrat, 1999). Senada dengan pendapat di atas Emil Salim (dalam Bagong Suyanto, 1996) mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sedangkan Ritonga (dalam Arif Satria, 2016) mendefinisikan kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kemiskinan dapat pula didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakberuntungan, sebagaimana pendapat Sutomo (2008), yakni kondisi yang disebabkan karena beberapa kekurangan dan kecacatan individual, baik dalam bentuk kelemahan biologis, psikologis maupun kultural yang menghalangi seseorang memperoleh kemajuan dalam kehidupannya. Lebih lanjut Sutomo (2008)) menyitir pendapat Chamber yang menyatakan bahwa, pada dasarnya kemiskinan disebabkan oleh lima ketidak-beruntungan (*disadvantages*), yakni: 1) Keterbatasan kepemilikan asset (*poor*); 2) Kondisi fisik yang lemah (*psysically weak*); 3) Keterisolasian (*isolation*); 4) Kerentanan (*vulnerable*); dan 5) Ketidakberdayaan (*powerless*). Kelima aspek tersebut menyebabkan kondisi seseorang, kelompok atau masyarakat menjadi miskin. Dilihat dari sisi *poverty profile* masyarakat, menurut Tjokrowinoto seperti dikutip Ambar Teguh Sulistiyani (2004), kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi juga menyangkut kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada pelbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi pangan, angka ketergantungan yang tinggi karena besarnya keluarga, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, pengertian kemiskinan mengalami perluasan, tidak saja mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut aspek lain, seperti kerentanan, ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi, dan ketidakberdayaan.

Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dalam kaitan ini, Bank Dunia mendefinisikan keadaan miskin sebagai : "*Poverty is concern with absolute*

standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society" (Gunawan Sumodiningrat, 1999). Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Dari sisi ini, kemiskinan bisa dibedakan menjadi dua yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Menurut Muhadjir Darwin (2005), kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kemiskinan absolut adalah derajat kepemilikan materi atau standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga yang berada di garis atau di bawah garis subsistem. Lebih lanjut Muhadjir Darwin juga mengutip pendapat Sayogyo yang menyebutkan bahwa, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, Ambar Teguh Sulistiyani (2004) menyatakan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan dimana tingkat pendapatan masyarakat rendah, sehingga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan dasar. Orang miskin absolut biasanya akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup karena pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal.

Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada di lapis terbawah dalam presentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dengan kategorisasi seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak-hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada di lapisan terbawah (Muhadjir Darwin, 2005). Sementara

Ambar Teguh Sulistiyani (2004) menyatakan kemiskinan relatif adalah suatu keadaan dimana tingkat pendapatan masyarakat sudah mencapai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, akan tetapi secara relatif mereka berada di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pendapat senada dikemukakan Gunawan Sumodiningrat (1999), seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin secara relatif apabila tingkat pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, orang atau rumah tangga tersebut masih berada dalam keadaan miskin.

Berdasarkan indikator kemiskinan menurut BPS (dalam Wignyo Adiyoso, 2009) penduduk dikategorikan miskin adalah penduduk dengan sumber pendapatan yang tidak cukup untuk menanggung kehidupan yang layak. Ciri-cirinya yaitu pendapatan rendah atau dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan diukur dari jumlah pengeluaran kebutuhan dasar makanan, seperti beras, gula, garam, minyak goreng, dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan dasar, dan kesehatan. Sementara itu, Emil Salim (1980) mengemukakan lima ciri-ciri penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. *Pertama*, pada umumnya mereka tidak mempunyai faktor produksi seperti tanah, modal, ataupun keterampilan, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas. *Kedua*, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. *Ketiga*, tingkat pendidikan mereka umumnya rendah karena waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan penghasilan. *Keempat*, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. *Kelima*, mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai. Selanjutnya menurut Dalil Hasan (dalam Gunawan Sumodiningrat, 1999), kelompok penduduk miskin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, sebagian besar penduduk miskin tidak mempunyai penghasilan tetap. *Kedua*, pada umumnya penduduk miskin

tidak bekerja secara penuh (*full time*). *Ketiga*, mereka kebanyakan tidak mempunyai peralatan produksi/peralatan kerja yang memadai. *Keempat*, sebagian besar penduduk miskin berpendidikan rendah.

Kemiskinan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan akar penyebab yang melatarbelakanginya, dikenal dengan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Sunyoto Usman (dalam Istiana dkepala keluarga, 2015) menyatakan bahwa klasifikasi kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural adalah pengkajian kemiskinan dengan fokus pada sebab terjadinya kemiskinan. Muhajir Darwin (2005) menyebutkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh berbagai kebijakan negara yang bukan saja tidak menguntungkan, melainkan juga menjadikan mereka dimiskinkan. Dengan demikian, mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Sementara Selo Sumardjan (dalam Sutomo, 2008) mengemukakan bahwa, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut menghambat mereka untuk dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Pernyataan di atas senada dengan pendapat Sutomo (2008), karena tidak meratanya penguasaan sumber daya dalam masyarakat, maka sebagian anggota masyarakat tetap miskin. Dalam kondisi demikian kelompok masyarakat menjadi tidak berdaya (*powerless*) dan rentan, sehingga akan semakin mengukuhkan posisi miskin tersebut. Dengan demikian, kemiskinan struktural ini terjadi bukan karena “ketidakmauan” seseorang untuk bekerja (malas), melainkan karena “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam masyarakat menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan orang dapat bekerja atau mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya.

Sementara itu, kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor budaya setempat (lokal). Nilai-nilai dan kebudayaan yang diyakini

atau yang dianut dan dikembangkan dalam masyarakat, menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri, karena banyak diwarnai oleh sikap dan cara pandang masyarakat tersebut terhadap kehidupan. Sikap-sikap tersebut antara lain tercermin dalam watak mereka yang cenderung fatalistik, "nrimo", dan kurang berorientasi ekonomi. Kegiatan ekonomi lebih dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan subsistensi saja dan bukan untuk memupuk kapital. Dengan cara pandang semacam itu, maka secara turun temurun mewariskan kemiskinan kultur pada generasi berikutnya, sehingga "lingkaran kemiskinan" terus membelit dan tak kunjung putus (Gunawan Sumodiningrat, 1999). Lebih lanjut Oscar Lewis berpendapat (dalam Gunawan Sumodiningrat, 1999), bahwa orang-orang miskin adalah kelompok sosial yang mempunyai budaya sendiri. Budaya itu, diturunkan dari generasi ke generasi yang dilestarikan secara terus menerus, memiliki karakteristik sosial dan psikologis tersendiri bagi anggotanya. Lewis mengkonseptualisasikan sebagai kebudayaan kemiskinan (*cultural of poverty*). Demikian pula Andre Bayo Ala (1981) juga menyitir pendapat Lewis, yang menyatakan ciri-ciri kebudayaan kemiskinan adalah orang-orang miskin tidak mempunyai respek dan tidak terintegrasikan dengan lembaga-lembaga utama yang ada dalam masyarakat.

Masalah kemiskinan juga dijumpai di Indonesia, dengan penyebab yang bersumber karena struktural maupun kultural, dan masalah ini menjadi salah satu tantangan besar yang harus diatasi secara serius. Meskipun telah lama diupayakan untuk dihapuskan, namun masalah kemiskinan itu tetap ada dan hidup bersama bangsa ini (Gunawan Sumodiningrat, 1999). Sebenarnya dapat dikatakan kemiskinan merupakan ironi di negeri ini. Sebagai negeri yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, Indonesia masih saja menghadapi masalah kemiskinan yang hampir merata di sejumlah provinsi di Indonesia. Melihat kenyataan tersebut, maka diperlukan tekad bersama untuk memerangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat

ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, mengingat masalah kemiskinan sangat besar dampaknya bagi perkembangan masalah sosial lain yang lebih kompleks. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 sebanyak 27,76 juta jiwa (10,70%), menurun dibandingkan September tahun sebelumnya yang mencapai 28,59 juta jiwa (11,22%) dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengandung makna bahwa dalam waktu satu tahun pemerintah baru mampu mengentaskan kemiskinan sebanyak 0,52 persen. Oleh karena itu, kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang serius dan penanganannya menjadi prioritas, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif dan terpadu, melibatkan berbagai pihak terkait.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999), masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multi-dimensional, yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan berbagai persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multi-dimensialnya tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (*material well-being*), tetapi juga berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*). Andre Bayo Ala (1981) menyatakan bahwa, kemiskinan itu multidimensional, karena banyak sekali nilai-nilai yang dibutuhkan atau kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Demikian pula pernyataan Saunders yang dikutip Istiana, bahwa kemiskinan adalah persoalan multidimensional. Studi mengenai kemiskinan harus diletakkan keluarga dalam konteks ketidakadilan sosial ekonomi dalam struktur, proses, kebijakan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh ada atau tidak adanya satu faktor saja, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhi. Heru Nugroho mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah

multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga politik dan budaya. Hal senada juga dinyatakan oleh Moestopo, bahwa kemiskinan pada hakikatnya adalah masalah kompleks yang meliputi kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial, kemiskinan budaya, kemiskinan psikologis, kemiskinan religi, dan kemiskinan politik. Sementara itu Susetiawan mengemukakan bahwa dimensi kemiskinan terdiri atas: *Pertama*, kemiskinan berdimensi ekonomi atau material; *Kedua*, kemiskinan berdimensi sosial budaya; *Ketiga*, kemiskinan berdimensi struktural atau politik. Lebih lanjut Sukmana menjabarkan dimensi tersebut, dimensi ekonomi atau material mencakup berbagai kebutuhan manusia yang bersifat material seperti sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Dimensi sosial budaya terkait melembaganya budaya apatis, apolitik, fatalistik, ketidakberdayaan yang melekat pada kaum miskin. Kemiskinan secara ekonomi sulit diatasi jika budaya ini tidak dihilangkan. Sedangkan dimensi struktural politik terkait ketiadaan sarana dan akses bagi kaum miskin untuk terlibat dalam proses politik, sehingga tidak memiliki kekuatan politik. Kemiskinan politik ini akan berimbas pada kemiskinan ekonomi (Istiana, 2015).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan multidimensi. Kemiskinan tidak hanya memiliki dimensi tunggal yaitu ekonomi saja, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, psikis, dan politik. Sebagaimana dinyatakan Gunawan Sumodiningrat (1999), dimensi-dimensi kemiskinan pada hakikatnya merupakan refleksi bahwa kebutuhan manusia yang tidak hanya bersifat ekonomi semata. Oleh karena itu program pengentasan kemiskinan seyogyanya tidak hanya memprioritaskan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi lain. Dimensi kemiskinan ini saling berpengaruh satu sama lain, untuk itu akan diuraikan dimensi-dimensi apa saja yang menyertai kemiskinan.

Pertama, yang paling jelas adalah bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti

pangan, sandang, dan perumahan. Kemiskinan berdimensi ekonomi dapat dimaknai sebagai kondisi ketidakmampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas, kemampuan pemenuhan kebutuhan sandang (membeli pakaian setiap anggota keluarga) pertahun, ketersediaan tempat tinggal yang layak. Di samping itu, juga dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar, pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pekerjaan, ketersediaan sumber penghasilan, kepemilikan aset, dan pemenuhan kebutuhan rekreasi. *Kedua*, kemiskinan berdimensi sosial. Kemiskinan ini dapat dimaknai sebagai kondisi yang menghambat keluarga dalam menjalankan relasi dan fungsi sosial serta dalam mengakses sumberdaya yang dibutuhkan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial-keagamaan di lingkungannya, keterbatasan dalam komunikasi dengan anggota keluarga, keterbatasan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan dalam pengumpulan dana sosial/bantuan kemanusiaan, keterbatasan dalam mengakses pelayanan sosial/publik (seperti layanan pemerintah dalam penerbitan akta kelahiran dan identitas/KTP, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan air bersih/listrik, layanan transportasi) yang menjadi hak keluarga fakir miskin.

Ketiga, kemiskinan berdimensi budaya. Kemiskinan ini dapat dimaknai sebagai kondisi yang menggambarkan tidak adanya harmonisasi/kerukunan di antara keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, tidak adanya kebiasaan hidup bersih dan sehat, adanya etos kerja yang rendah, tidak adanya kebiasaan hidup hemat, suka menabung/investasi dan memiliki perencanaan yang matang, kurang memiliki orientasi ke masa depan (keinginan untuk maju), kurang mandiri/sangat tergantung pada orang lain, terjerat dalam sistem ekonomi yang merugikan dan terbelenggu dalam norma adat dan nilai sosial budaya yang menghambat. *Keempat*, kemiskinan berdimensi psikis. Kemiskinan ini dapat dimaknai sebagai sebagai kondisi yang menghambat keluarga dalam menjalankan agama dan kepercayaan sesuai

keyakinan, tidak terpenuhinya rasa aman/bebas dari rasa takut, tidak adanya rasa percaya diri, tidak terpenuhinya lingkungan alam dan sosial yang sehat, tidak dapat memanfaatkan waktu luang secara bermakna, dan keterbatasan dalam memperoleh bantuan dari saudara, kerabat atau teman ketika membutuhkan. *Kelima*, kemiskinan berdimensi politik. Kemiskinan ini dapat dimaknai sebagai kondisi yang menghambat keluarga dalam menggunakan hak politik dalam pemilihan umum, berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di wilayahnya, berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan di wilayahnya, dan berpartisipasi dalam penentuan sasaran program layanan sosial/publik (penerima bantuan).

Mengingat masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan multidimensi, maka untuk mengatasi masalah kemiskinan juga harus bersifat multidimensional atau menggunakan pendekatan yang komprehensif dan lintas sektoral. Namun demikian, harus pula ditelusuri faktor apa yang cukup dominan menjadi penyebab kemiskinan di suatu daerah atau yang diderita suatu masyarakat, sehingga diperlukan identifikasi yang jelas untuk lebih memudahkan upaya mengatasinya. Untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan kemiskinan di Sulawesi Selatan, penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga terkait, khususnya Kementerian Sosial RI sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang berkait dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang faktor determinan penyebab kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Komponen kuantitatif dan kualitatif saling berproses secara simultan, kedua pendekatan menuju pada pertanyaan-pertanyaan yang sama, tetapi disampaikan dengan cara dan teknik yang berbeda sehingga menghasilkan data yang terpadu. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode utama

karena dapat menggali tentang kehidupan sosial masyarakat melalui pandangan dan pengalaman-pengalamannya, sementara pendekatan kuantitatif sebagai metode sekunder. Menurut Lewis seperti dikutip Wignyo Adiyoso (2009), kelebihan pendekatan ini adalah peneliti bisa mendapatkan perspektif yang lebih alamiah/natural dari kehidupan masyarakat dan membuka peluang untuk pendalaman yang lebih rinci dari pandangan individu-individu dalam masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah mengetahui faktor determinan penyebab kemiskinan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi menggunakan teknik *purposive*, yaitu memilih salah satu provinsi dari 34 provinsi yang digunakan sebagai lokasi penelitian Konsep dan Indikator Kemiskinan. Populasi penelitian ini adalah seluruh keluarga fakir miskin yang teregister dan yang tidak teregister. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara acak/random berjumlah 1.200 orang berasal dari dua wilayah (Kota Makassar & Kabupaten Maros). Tiap wilayah 600 orang dengan rincian 540 orang berasal dari kepala keluarga miskin teregister dan 60 orang kepala keluarga miskin non register atau yang belum mendapatkan program.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi: angket/kuesioner, panduan wawancara, lembar pengamatan, dan dokumentasi. Instrumen angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi kemiskinan responden. Untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang kondisi responden digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan berpedoman pada panduan wawancara (*interview guide*). Adapun studi dokumentasi dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya data penelitian, baik yang dilaporkan oleh lembaga resmi maupun laporan yang dibuat oleh pihak lain yang relevan.

Data dan informasi yang dijarah secara kuantitatif diolah secara komputasi dengan menggunakan program *excel* dan statistik SPSS versi 17.00 for Windows, serta

pengujian konstruk kemiskinan menggunakan *confirmatory Faktor Analysis* dengan bantuan program LISREL 8.4, hasilnya dideskripsikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka data yang sudah dikumpulkan dikelompokkan menurut substansi permasalahannya. Langkah berikutnya diinterpretasikan dan dianalisis secara diskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan data sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan menganalisa hasil interpretasi data berdasarkan argumentasi yang bersifat faktual dan ilmiah. Hasil interpretasi tersebut disajikan dalam bentuk narasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi dan Responden Penelitian

Propinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 46.083,94 km, secara administrasi terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota. Ke 21 kabupaten meliputi Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Toraja Utara. Sementara 3 kota meliputi Makassar, Palopo dan Pare-Pare.

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2013 mencapai 8.342.027 jiwa, terdiri dari 4.071.434 laki-laki dan 4.270.613 perempuan. Jumlah penduduk Kota Makassar sebanyak 1.408.072 jiwa. Penduduk Kabupaten Maros sebanyak 331.846 jiwa. Usia harapan hidup (UHH) Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 70,60 tahun, Kota Makassar sebagai lokus kajian tingkat kota mencapai UHH 74,38 tahun, dan Kabupaten Maros sebagai lokus kabupaten, mencapai UHH 73,55 tahun. Data ini menunjukkan keluarga bahwa UHH di dua lokasi penelitian lebih tinggi dibanding UHH tingkat propinsi. Kondisi ini tidak lepas dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut usia terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1

Partisipasi Sekolah berdasar Kelompok Umur

No	Usia	Persentase
1	7 – 12	98,11
2	13 - 15	89,53
3	16 - 18	62,11

Sumber : Diolah dari Sulsel Dalam Angka, BPS: 2014

Data di atas menunjukkan bahwa partisipasi penduduk Sulawesi Selatan dalam menamatkan pendidikan dasar sembilan tahun (SLTP) sangat menggembirakan, yakni hampir 90 persen dari anak usia sampai dengan 15 tahun berstatus sekolah. Sementara untuk jenjang SLTA masih memerlukan perhatian lebih, karena baru mencapai 62,11 persen anak usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi sekolah.

Derajat kesehatan masyarakat tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur kesehatan. Fasilitas kesehatan tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2

Jumlah Fasilitas Kesehatan

No	N a m a	Jumlah		
		Sulsel	Makassar	Maros
1	Rumah Sakit	77	35	5
2	Puskesmas	431	43	14
3	Puskesmas Pembantu	1.267	40	33
4	Puskesmas Keliling	450	30	16
5	P o s y a n d u Paripurna	9.183	972	388

Sumber : Diolah dari Sulsel Dalam Angka, BPS: 2014

Ketersediaan fasilitas kesehatan di atas dilengkapi dengan paramedis yang berjumlah 15.792 orang terdiri dari dokter sebanyak 2.867 orang, bidan berjumlah 3.771 orang, dan perawat 9.154 orang sehingga mampu menekan kematian ibu hamil dan kematian bayi. Data kelahiran tahun 2012 mencapai 140.107 bayi, hanya 2,7 persen lahir dengan berat badan rendah (BBLR) dan yang mengalami gizi buruk hanya 0,35%. Program Keluarga Harapan (PKH) ikut berperan dalam penurunan angka kematian bayi dan ibu hamil, serta peningkatan partisipasi sekolah.

Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun

2012, Kota Makassar dan Kabupaten Maros tahun 2013 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3
PMKS di Sulawesi Selatan (2012),
Makassar dan Maros (2013)

No	Jenis	Jumlah		
		Sulsel	Makassar	Maros
1	Anak Balita Terlantar	37.943	1.887	59
2	Anak Terlantar	111.454	6.064	2.508
3	Anak Nakal	3.947	25	135
4	Anak Jalanan	2.161	1.769	-
5	Orang Dengan Kecacatan	82.170	1.431	1.172
6	Lanjut Usia Terlantar	87.177	3.998	2.396
7	Tuna Susila	475	346	-
8	Gelandangan & Pengemis	684	340	-
9	Pekerja Migran Terlantar	832.910	97	206
10	Keluarga Fakir Miskin	208.277 kepala keluarga	45.236	20.188
11	Keluarga Rentan/ Daerah Bencana	1.610 kepala keluarga	-	22.771
12	Kel Bermsh Sos Psikologis	2.064 kepala keluarga	143	259
13	Korban Napza	112.944	82	-
14	Korban Bencana Alam	1.350	255	858
15	Korban Bencana Sosial	447	210	-
16	Rumah Tidak Layak Huni	203.530	3.197	6.374
17	Komunitas Adat Terpencil	5.330	43	451
18	ODHA	39	28	-
19	Wanita Rawan Sos Ek	30.693	1.487	1.011
20	Korban Tindak Kekerasan	929	85	-
21	Eks Kusta/ Penyakit Kronis	-	2.025	43
22	Eks Binaan LP	-	25	366
23	Pemulung	-	997	-

Sumber: Pusdatin, Kemensos, 2014 dan Dinso Kota Makassar dan Dinsonakertrans Kabupaten Maros, 2015

Masalah sosial terbanyak di propinsi Sulawesi Selatan sama dengan propinsi lain,

yakni keluarga fakir miskin yang mencapai 208.277 kepala keluarga. Demikian pula untuk Kota Makassar maupun Kabupaten Maros, keluarga fakir miskin menempati urutan pertama masalah sosial di wilayah tersebut. Kemiskinan merupakan akar berbagai masalah sosial seperti keterlantaran anak dan lansia, rumah yang tidak layak huni, bermasalah sosial psikologis, terpaksa menjadi gepeng dan pemulung, serta rentan tindak kekerasan. Pekerja migran terlantar mencapai 832.910 orang, jumlah yang relatif banyak. Hal ini dikarenakan selain Sulsel sebagai daerah asal pekerja migran juga sebagai daerah antara/transit. Kebanyakan migran terlantar berasal dari Kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba, dan Selayar yang merupakan kantong-kantong pekerja migran. Sedangkan pekerja migran yang berasal dari luar propinsi, umumnya dari NTT, NTB, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pemerintah Sulsel menyediakan Rumah perlindungan *Trauma Centre* (RPTC) untuk menampung sementara pekerja migran sebelum diambil oleh petugas dinas sosial dari daerah asal mereka.

Sementara data tentang potensi sumber kesejahteraan sosial Propinsi Sulawesi Selatan terdiri dari.

Tabel 4
PSKS di Sulawesi Selatan,
Makassar, dan Maros 2013

No	Jenis	Jumlah		
		Sulsel	Makassar	Maros
1	Pekerja Sosial Profesional	43	37	-
2	Pekerja Sosial Masyarakat	1.765	126	170
3	Karang Taruna	2.043	143	98
4	TAGANA	1.987	248	35
5	WKSMB	211	143	20
6	LKS/Orsos	501	168	35
7	LK3	26	1	1
8	Keluarga Pionir	1	-	-
9	DU - UKS	59	-	-
10	Tenaga Pelopor/Kader Wanita	25	-	41
11	TKSK	306	14	14

Sumber : Dinas Sosial Propinsi Sulsel, 2015

Personil representasi Kementerian Sosial yang dikenal sebagai TKSK, TKSM, TAGANA,

PSM maupun kelembagaan seperti Karang Taruna, WKSBM, LK3, LKS jumlahnya sudah sangat menggembirakan. Berbagai personil tersebut selain mendapat tali asih dan atau honor dari Kementerian Sosial juga mendapat insentif dari APBD I dan APBD II. Demikian pula keberadaan berbagai lembaga yang bergerak dalam pelayanan kesejahteraan sosial selain mendapat bantuan APBN melalui Kementerian Sosial juga banyak yang telah mendapatkan bantuan operasional dan pembinaan dari pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota.

Responden yang berjumlah 1.200 kepala keluarga menurut jenis kelamin terdiri dari 959 orang (80%) laki-laki sebagai kepala keluarga dan 241 orang (20%) perempuan. Kepala keluarga laki-laki di Kota Makassar berjumlah 485 orang dan perempuan 115 orang, sedangkan kepala keluarga laki-laki di Kabupaten Maros sebanyak 474 orang dan perempuan 126 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas keluarga, baik di Makassar maupun Maros dikepalai oleh laki-laki/ayah. Sementara perempuan yang menjadi kepala keluarga karena berstatus janda atau belum menikah dan masih tinggal dengan orangtua yang berstatus sebagai anggota keluarga.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan responden mayoritas tamatan SD/MI/Sederajat berjumlah 487 orang (40,58%). Kondisi ini tentu berkait dengan jenis pekerjaan yang dapat diakses dan besarnya penghasilan keluarga. Data tentang pendidikan terakhir kepala keluarga

gabungan antara data di Kota Makassar dan Kabupaten Maros terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5
Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga di Makassar dan Maros

No	Tingkat Pendidikan	Makassar		Maros	
		F	%	F	%
1	Tidak Sekolah	65	10.83	117	19.50
2	Belum/Tidak Tamat SD/Sederajat	126	21.00	93	15.50
3	SD/MI/Sederajat	211	35.17	271	45.10
4	SMP/MTs/Sederajat	95	15.83	57	9.50
5	SMA/SMK/MA/Sederajat	102	17.00	57	9.50
6	Diploma I/II	0	0.00	1	0.17
7	Diploma III/Sarjana Muda	0	0.00	2	0.33
8	Diploma IV/S1	1	0.17	2	0.33
9	S2/S3	0	0.00	0	0.00
Jumlah		600	100.00	600	100.00

Sumber : Data primer, 2015

Mayoritas kepala keluarga baik di Kota Makassar maupun Kabupaten Maros hanya berpendidikan dasar, sehingga layak apabila masuk dalam kategori miskin. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada aksesibilitas seseorang terhadap lapangan pekerjaan. Orang dengan tingkat pendidikan rendah mustahil mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi, kecuali mempunyai bakat usaha sebagai wiraswasta.

Tabel 6
Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga di Makassar dan Maros

No	Jenis Pekerjaan	Makassar				Maros			
		Utama		Sampingan		Utama		Sampingan	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Usaha Sendiri	74	12.33	8	1.33	108	18.00	24	4.00
2	Usaha dengan buruh tetap/tidak tetap	65	10.83	5	0.83	28	4.67	14	2.33
3	Buruh/Karyawan/Pegawai Tetap	78	13.00	10	1.67	105	17.50	8	1.33
4	Buruh pertanian tidak tetap	12	2.00	3	0.50	103	17.17	17	2.83
5	Buruh tidak tetap non pertanian	181	30.17	11	1.83	47	7.83	20	3.33

6	Pensiun	0	0.00	0	0.00	1	0.17	0	0.00
7	Tidak Bekerja	160	26.67	535	89.17	160	26.67	468	78.00
8	Lainnya	30	5.00	28	4.67	30	8.00	48	8.00
Jumlah		600	100.00	600	95.50	600	100.00	599	100.00

Sumber : Data primer, 2015

Jumlah kepala keluarga sasaran penelitian di Makassar maupun Maros yang berstatus tidak bekerja dalam minggu terakhir dapat dikatakan seimbang. Di Makassar 160 orang (26,67%) kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan utama dan 535 orang (89,17%) tidak memiliki pekerjaan sampingan. Sementara di Maros 160 orang (26,67%) juga tidak memiliki pekerjaan utama dan 468 orang (78%) tidak memiliki pekerjaan sampingan. Jenis pekerjaan kepala keluarga berkait erat dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan, dimana mayoritas tamatan SD dan hanya sedikit yang sampai jenjang tamat SMA/MA. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sebanyak lebih dari empat jiwa mencapai 41,25 persen, antara tiga sampai empat jiwa sebanyak 44,33 persen, dan kurang dari tiga sebanyak 14,42 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa rata-rata tanggungan kepala keluarga pada kisaran tiga jiwa keatas.

Penghasilan keluarga per bulan di Kota Makassar dan Kabupaten Maros terlihat pada tabel berikut.

Penghasilan keluarga di Makassar berimbang dalam kategori 2, 3 dan 4 yakni antara Rp. 601.000,- sampai dengan Rp. 2.400.000,- dengan jumlah keluarga 166 – 167 pada masing-masing kategori. Sementara penghasilan keluarga di Maros mayoritas berada pada kategori 2 dan 3, yakni antara Rp. 601.000,- sampai dengan Rp. 1.800.000,-. Perbedaan kisaran mayoritas penghasilan keluarga ini terpengaruh oleh jenis pekerjaan. Kabupaten Maros lebih unggul dalam penghasilan minimal maupun maksimal keluarga dibanding Kota Makassar, kondisi ini dikarenakan responden dari salah satu kecamatan (Marusu) baru saja menerima uang kompensasi pembebasan tanah bagi perluasan bandar udara Sultan Hasanuddin. Menurut indikator kemiskinan Sulsel, keluarga yang berpenghasilan \leq Rp. 500.000,- masuk kategori sangat miskin, antara Rp. 500.000,- - Rp. 1.500.000,- termasuk miskin, dan antara Rp. 1.600.000,- - Rp. 1.800.000,- rentan miskin. Berdasar rata-rata penghasilan, keluarga sasaran penelitian di Makassar masuk kategori rentan miskin, sedangkan keluarga sasaran penelitian di Maros termasuk kategori miskin.

Tabel 7
Penghasilan Keluarga (Bulan)
di Makassar dan Maros

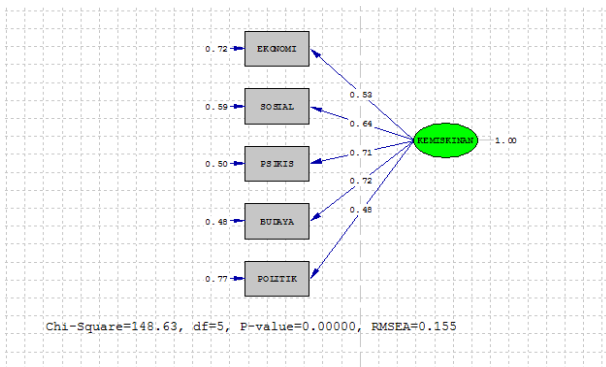
Kategori	Makassar		Maros	
	F	%	F	%
\leq Rp 600.000,00	48	8.00	90	15.00
Rp 601.000,00 - Rp 1.200.000,00	166	27.67	203	33.83
Rp 1.201.000,00 - Rp 1.800.000,00	167	27.83	168	28.00
Rp 1.801.000,00 - Rp 2.400.000,00	166	27.67	82	13.67
Rp 2.401.000,00 - Rp 3.000.000,00	42	7.00	33	5.50
$>$ Rp 3.000.000,00	11	1.83	24	4.00
Jumlah	600	100.00	600	100.00
Minimal	120000		200000	
Maksimal	3600000		5600000	
Rata-rata	1604873		1424043	

Sumber : Data primer, 2015

2. Faktor Determinan Penyebab Kemiskinan

Hasil analisis konstruk kemiskinan Propinsi Sulawesi Selatan (Kota Makasar dan Kabupaten Maros) melalui estimasi koefisien bobot faktor (*standardized loading factor*) diketahui bahwa dari lima dimensi yang membentuk kemiskinan, yaitu dimensi ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik, empat dimensi diantaranya memiliki bobot faktor lebih besar dari 0.50. Dimensi tersebut adalah dimensi budaya pada posisi tertinggi dengan *loading factor* 0.72, dimensi sosial pada posisi kedua dengan nilai *loading factor* 0.71, dimensi sosial menduduki posisi ketiga terbesar dengan bobot faktor 0.64 serta dimensi ekonomi dengan bobot faktor 0.53. Adapun dimensi politik diketahui memiliki nilai *loading factor* sebesar 0.48 atau kurang dari 0.50. Hal tersebut berarti bahwa dimensi politik kecil pengaruhnya terhadap kemiskinan.

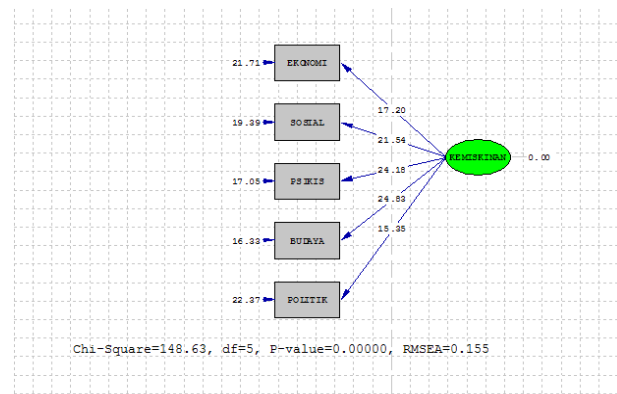
Gambar 1 : Basic Model Standardized Solution



Dari hasil pengukuran konstruk kemiskinan, terbukti bahwa empat variabel teramati (*observer*) yaitu budaya, psikis, sosial, dan ekonomi memiliki kontribusi yang relatif sama besar dalam membentuk kemiskinan di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Hal ini bila dilihat dari besarnya nilai muatan faktor standar untuk ke empat variabel tersebut, yaitu $\geq 0,50$. Menurut Igbaria et al (dalam Istiana, 2015) bahwa suatu variabel dikatakan memiliki validitas yang baik terhadap konstruk apabila muatan standarnya (*standardized factor loading*) $\leq 0,50$. Empat dimensi dalam penelitian ini memiliki validitas yang baik, karena muatan faktor standar dari dimensi budaya sebesar 0,72, dimensi psikis 0,71, dimensi sosial 0,64, dan dimensi ekonomi sebesar 0,53.

Sedangkan dimensi politik memiliki muatan faktor standar sebesar 0,48. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar dimensi memiliki kontribusi yang tinggi dalam membentuk kemiskinan karena memiliki muatan faktor standar ($\geq 0,50$). Ini berarti, dimensi budaya, psikis, sosial, dan ekonomi memiliki kontribusi dalam membentuk kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makasar dan Kabupaten Maros.

Gambar 2 : Basic T-Values



Untuk menguji intensitas pengaruh/signifikan variabel *observer* terhadap variabel *latent* ditampilkan dalam bentuk *Basic T-Value Model*. Hasil analisis *Basic T-Value Model* dapat dilihat dalam gambar 2 di atas. Dari gambar tersebut dapat dimaknai bahwa semua *manifest* memiliki t hitung $> 1,96$ sehingga dinyatakan signifikan atau tidak sama dengan nol. Pada *path diagram* di atas, diketahui nilai t statistik kelima dimensi yang membentuk kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan terutama Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Nilai t statistik untuk dimensi politik mencapai 15,35, dimensi ekonomi 17,20, dimensi sosial 21,54, dimensi psikis 24,18 dan dimensi budaya mencapai 24,83. Berdasarkan hasil tersebut, kelima dimensi memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk kemiskinan di Sulawesi Selatan (Kota Makassar dan Kabupaten Maros). Hasil penelitian ini menguatkan argumen bahwa kemiskinan di Indonesia adalah multi dimensi, artinya kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh banyak dimensi/variabel, bukan semata-mata dipengaruhi dimensi tunggal yaitu dimensi ekonomi saja. Dengan demikian faktor determinan

penyebab kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah dimensi budaya karena dimensi ini menduduki urutan pertama, kemudian disusul urutan kedua dimensi psikis, ketiga dimensi sosial, keempat dimensi ekonomi, dan urutan kelima dimensi politik.

Hasil analisis tersebut, didukung oleh data kuantitatif deskriptif yang menunjukkan bahwa responden penelitian yakni keluarga miskin di Propinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar dan kabupaten Maros) tidak memiliki kebiasaan bekerja dan atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama lebih dari 40 jam/minggu. Keluarga miskin memiliki kebiasaan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan non primer seperti *handphone*, sepeda motor, dan barang elektronik lainnya sehingga tidak memiliki tabungan. Berbagai barang tersebut mereka anggap sebagai kebutuhan pokok dan dapat meningkatkan status di lingkungan pergaulan maupun tempat tinggal. Kebiasaan belanja kebutuhan non primer ini sesuai dengan ditemukannya pengeluaran non konsumsi yang lebih tinggi di banding konsumsi pada masyarakat miskin.

Keluarga miskin tidak atau kurang memiliki aspirasi masa depan khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia generasi berikutnya. Alasan ketiadaan biaya untuk transportasi dan pembelian peralatan sekolah menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin rata-rata hanya menamatkan pendidikan dasar (SD/SMP) yang keberadaan fasilitas pendidikannya tidak jauh dari tempat tinggal dan relatif tidak membutuhkan tambahan biaya karena sudah ada BOS. Masyarakat Sulawesi Selatan masih memiliki sistem kekerabatan yang tinggi baik karena ikatan darah maupun kedekatan tempat tinggal. *Extended family* bukan *nuclear family* masih banyak ditemui pada masyarakat kelas menengah ke bawah di propinsi ini, sehingga jamak terjadi dalam satu rumah dihuni oleh beberapa keluarga yang berasal dari empat generasi, mulai dari kakek-nenek, bapak-ibu, anak-menantu, dan cucu/cicit. Kondisi ini menyebabkan keluarga miskin memiliki ketergantungan tinggi pada saudara atau kerabat, dan sistem resiprokal

masih berlaku baik dalam kehidupan sehari-hari maupun *event-event* tertentu seperti hajatan. Satu nilai positif dengan masih terjaganya *extended family* dan resiprokal yakni mampu membetengi masyarakat miskin untuk tidak terjat rentenir.

Terkait dengan aspek budaya yang menempati posisi tertinggi sebagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan, kiranya tidak lepas dari budaya *siri' na pacce*. Kata *siri'* dalam bahasa Bugis dan Makassar berarti "malu", sedangkan *Pacce* (Bugis: *Pesse*) dapat berarti "tidak tega"/"kasihan"/"iba". *Pacce* merupakan kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). Struktur *Siri'* dalam Budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori, yaitu:

1. *Siri' Ripakasiri'*, yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. *Siri'* jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa.
2. *Siri' Mappakasiri'siri'*, *Siri'* jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan, "*Narekepala keluargao degaga siri'mu, inrengko siri'.*" Artinya, kalau Anda tidak punya malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu (*Siri'*). Begitu pula sebaliknya, "*Narekepala keluargao engka siri'mu, aja' mumapakasiri'-siri'.*" Artinya, kalau Anda punya malu maka jangan membuat malu (*malu-maluin*). Implementasi dari *siri'* ini, ketika sanak keluarga atau kerabat tertimpa kesusahan atau musibah maka keluarga yang lain ikut membantu. Apabila seseorang akan terjerumus ke dalam nista karena khilaf maka keluarga yang lain wajib untuk memperingatkan dan meluruskannya.
3. *Siri' Tappela' Siri'* (Bugis: *Teddeng Siri'*), yakni rasa malu seseorang hilang "terusik" karena sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan

(disepakati). Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri.

4. *Siri' Mate Siri'*. *Siri'* yang berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis/Makassar, orang yang *matesiri'*-nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun. Orang seperti ini biasa disebut sebagai bangkai hidup yakni orang yang hidup tapi sudah tidak punya rasa.

Kemudian, guna melengkapi keempat struktur *Siri'* tersebut maka *Pacce* atau *Pesse* menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu budaya (karakter) yang dikenal dengan sebutan *Siri' Na Pacce*. Jadi, *pacce'* adalah perasaan (pernyataan) solidaritas yang terbit dari dalam kalbu yang dapat merangsang kepada suatu tindakan. Ini merupakan etos (sikap hidup) orang Bugis-Makassar sebagai pernyataan moralnya. *Pacce'* diarahkan keluar dari dirinya, sedangkan *siri'* diarahkan kedalam dirinya. *Siri'* dan *pacce'* inilah yang mengarahkan tingkah laku masyarakat Sulawesi Selatan dalam pergaulan sehari-hari sebagai “ motor “ penggerak dalam memmanifestasikan pola-pola kebudayaan dan sistem sosialnya (disarikan dari <https://imbasadi.wordpress.com/agenda/data-karya-ilmiah-bebas/unhas/makna-siri-na-pacce-dimasyarakat-bugis-makassar-friskawini/>, diakses 25 Desember 2015).

Aspek psikis menempati urutan kedua sebagai faktor penyebab kemiskinan di Sulawesi Selatan. Kuatnya ikatan keluarga yang tercermin masih banyak keluarga miskin yang menganut *extended family* dan masih terpeliharanya asas resiprokal sedikit banyak mempengaruhi kenyamanan hidup responden. Kondisi ini dapat diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang. Di satu sisi merupakan kebaikan, yakni mampu berperan sebagai penangkal dan solusi berbagai masalah yang menimpa keluarga miskin, di sisi lain melemahkan semangat untuk mandiri dan memperjuangkan hidup lebih layak. Kebutuhan psikis untuk dipandang terhormat kadang mengabaikan kondisi riil keluarga miskin, mereka rela membeli baju mahal untuk menunjang penampilan saat hajatan keluarga.

Kasus yang banyak terjadi di Kecamatan Marusu, Maros merupakan contoh aspek psikis penyebab kemiskinan. Banyak keluarga miskin di kecamatan ini mendadak kaya karena mendapat uang kompensasi lahan perluasan bandar udara. Masih bertahannya budaya urutan penempatan duduk berdasar status sosial seseorang pada berbagai pertemuan telah menginspirasi keluarga yang mendadak kaya tersebut untuk meningkatkan status sosialnya. Sebutan “haji” atau “hajah” menempati status sosial kedua setelah pejabat, oleh karena itu banyak keluarga yang menggunakan uang kompensasi untuk berangkat haji seluruh anggota keluarganya tanpa memikirkan pengganti penghasilan dari lahan yang telah berpindah kepemilikan. Akibatnya, sepulang dari haji memang keluarga tersebut naik statusnya tetapi kehidupannya tidak lebih baik dari sebelumnya bahkan sangat mungkin semakin terpuruk karena telah kehilangan lahan yang selama ini produktif dan menunjang kehidupannya.

Urutan ketiga faktor penyebab kemiskinan berupa aspek sosial, yakni menyangkut paranserta/partisipasi dan aksesibilitas. Sistem kekerabatan yang masih kental pada lingkungan keluarga miskin dengan asas resiprokalnya yang tercermin dalam budaya saling tolong menolong melonggarkan sistem kepemilikan dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Masalah yang dihadapi keluarga khususnya terkait dengan kebutuhan dasar seperti papan, sandang, dan pangan dipandang sebagai masalah keluarga besar dan ditanggung bersama-sama. Falsafah “semakin banyak kasih makan orang semakin banyak rejeki diterima” tertanam kuat pada kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga jamak ditemukan satu keluarga mengundang makan keluarga lain, atau mengantarkan makanan pada keluarga lain. Demikian pula jika ada kerabat yang sedang hajatan, sanak keluarga dan tetangga pasti memberikan bantuan moril maupun materiil. Sebagaimana telah diuraikan di atas pada aspek psikis, kondisi ini selain menguntungkan karena masih kuatnya rasa saling tolong menolong tetapi juga sebagai beban psikis dan sosial yakni harus mampu membalas kebaikan dan pertolongan.

Aksesibilitas keluarga miskin terhadap berbagai fasilitas sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum relatif baik. Mereka telah banyak mendapatkan layanan, seperti Raskin/Rastra, Jamkesmas/Jamkesda, dan BLSM. Permasalahan utama aksesibilitas terhadap berbagai layanan perlindungan sosial terkait dengan ketersediaan dana pendampingan program. Raskin/Rastra membutuhkan tebusan Rp. 1.600,-/kg (Rp. 24.000,-/rumah tangga) acapkali memberatkan keluarga miskin. Beberapa kabupaten/kota telah menggandakan tebusan tersebut melalui APBD sehingga keluarga miskin menerima Raskin/Rastra secara cuma-cuma. Perlindungan kesehatan gratis yang diberikan melalui Jamkesmas/Jamkesda hanya untuk biaya pasien, sementara untuk mengakses layanan kesehatan mereka membutuhkan biaya dampingan seperti transportasi dan akomodasi bagi diri dan atau pengantarnya. Demikian pula dalam pencairan BLSM, mereka membutuhkan biaya transportasi.

Aspek ekonomi yang selama ini dianggap sebagai aspek utama penyebab kemiskinan kiranya hanya menempati urutan keempat untuk Propinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan aspek ekonomi yang tidak menempati urutan pertama di lokasi ini kiranya terkait dengan masih kuatnya sistem kekerabatan dengan asas resiprokal pada keluarga miskin sasaran penelitian ini. Hampir tidak ditemukan keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makan minimal 2 kali/sehari dan membeli satu stel pakaian/orang/tahun. Satu-satunya aspek ekonomi yang menonjol berupa kepemilikan tempat tinggal. Karena banyak keluarga yang masih menganut *extended family* dan beberapa keluarga tinggal dalam satu rumah sehingga aspek rumah tinggal berupa luas lantai 8m/orang tidak terpenuhi.

Aspek politik, diantaranya keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta pemanfaatan sumber dan potensi kiranya telah disadari dan dilaksanakan oleh keluarga miskin. Iklim keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan telah berlangsung di propinsi ini. Satu hal yang belum dilakukan adalah pelibatan keluarga miskin dalam penentuan sasaran penerima bantuan perlindungan sosial. Selama ini sasaran

penerima berbagai program perlindungan sosial masih ditentukan oleh pemerintah berdasar kuota yang ada.

Senada dengan hal tersebut, data yang diperoleh melalui *in depth interview* juga menunjukkan bahwa budaya khususnya harga diri/rasa malu telah menjadi beban psikis dalam hubungan sosial masyarakat miskin dan sedikit banyak berpengaruh terhadap perekonomian mereka. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang responden: "Harga diri yang dinilai dari materi terlihat dalam pemberian mahar. Semakin tinggi status perempuan, misal sarjana dan sudah haji pasti keluarganya akan minta mahar yang tinggi yang kadang tidak mungkin terjangkau oleh keluarga pihak laki-laki. Kebutuhan mahar dan pesta tersebut biasanya dirunding dan disokong seluruh anggota keluarga. Meskipun tidak dibuat perjanjian utang piutang, tetapi sudah menjadi kewajiban untuk gantian saling membantu jika keluarga lain mengalami masalah". Kebiasaan saling tolong menolong merupakan modal sosial yang mampu menyelesaikan permasalahan, tetapi keberadaannya juga berdampak pada kebiasaan untuk menampilkan kemampuan semu bukan kemampuan nyata yang dimiliki oleh keluarga miskin.

D. SIMPULAN

Dari hasil pengukuran konstruk kemiskinan diketahui bahwa dari lima dimensi yang membentuk kemiskinan, yaitu dimensi ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik, empat dimensi diantaranya (ekonomi, sosial, psikis, budaya) memiliki pengaruh besar terhadap kemiskinan. Namun, dari empat dimensi tersebut yang paling besar pengaruhnya adalah dimensi budaya artinya, budaya merupakan faktor utama penyebab kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dimensi budaya memiliki kontribusi yang positif dan signifikan dalam membentuk kemiskinan di Sulawesi Selatan, utamanya menyangkut kebiasaan resiprokal atau saling membantu. Sebetulnya resiprokal merupakan modal sosial apabila tidak memberatkan dan tidak dianggap sebagai utang budi. Di saat dibutuhkan semisal hajatan, resiprokal sangat membantu karena kegiatan

dapat terlaksana dengan bantuan sanak saudara. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pada saat harus gantian membalas tidak punya sarana untuk melakukan, sehingga terpaksa berhutang. Budaya ini sangat terkait dengan kondisi psikis. Oleh karena itu, tidak heran jika faktor kedua penyebab kemiskinan adalah psikis. Merasa utang budi dan gengsi merupakan manifestasi dari kondisi psikis yang dialami keluarga miskin.

Dengan diketahuinya faktor determinan penyebab kemiskinan, hendaknya intervensi yang dibutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan lebih dititik beratkan pada penyadaran masyarakat tentang berbagai kebiasaan yang sudah menjadi budaya dan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Penyuluhan dan bimbingan sosial tentang hidup hemat, tidak mengada-ada, dan menolong semampunya perlu lebih sering dilakukan dengan tidak meninggalkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang selama ini sudah berjalan. Di samping itu, untuk mengubah kondisi tersebut perlu dilakukan dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam mengembangkan potensi tersebut, diperlukan upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat, agar masyarakat mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan masa depan kehidupannya.

Menumbuhkan keberdayaan pada masyarakat dapat memberikan kontribusi terciptanya kemandirian masyarakat, karena masyarakat akan memperoleh pemahaman dan mampu mengontrol daya sosial, ekonomi, dan politik agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Untuk mencapai kemandirian tersebut diperlukan sebuah proses, dengan kata lain masyarakat harus menjalani proses belajar. Melalui proses belajar, masyarakat secara bertahap memperoleh kemampuan yang memadai untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut meliputi: kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keterampilan teknis maupun manajerial mereka, sehingga akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai. Dengan demikian, terciptalah kemandirian masyarakat untuk dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada sumber data penelitian, redaksi, dan mitra bestari atas terselesainya dan terbitnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Andre Bayo Ala, 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Arif Satria, 2016. *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*. Bogor : IPB
- Bagong Suyanto, 1996. *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Emil Salim, 1980. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta : Yayasan Idayu
- Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: Impac.
- Istiana, dkepala keluarga, 2015. *Konsep dan Indikator Kemiskinan*. Yogyakarta : B2P3KS Press.
- Muhadjir M Darwin, 2005. *Memanusiakan Rakyat. Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta : Benang Merah.
- Sutomo, 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wigny Adiyoso, 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya : Putra Media Nusantara.